**Wabup Kudus Harapkan Masyarakat dan Pemerintah Bersinergi Patuhi Peraturan Pembayaran PBB**

KUDUS- Pagi ini (16/10) Wakil Bupati Kudus, Hartopo, ST, MM, MT. meminta baik masyarakat dan pemerintah bersinergi untk mematuhi peraturan pembayaran PBB (Pajak Bumi Bangunan). Hal ini disampaikan pada penandatanganan MOU antara Pemkab Kudus dengan KPP Pratama Kudus, Kantor BPN /ATR Kudus dan PT. PLN (Persero) UP3 Kudus, Launching Host to Host PBB P2 dan Satgas Pajak Daerah serta pengundian hadiah PBB-P2. Acara ini dihadiri oleh Forkopimda dan pimpinan Bank Jateng Cabang Kudus.

“Saya minta agar para camat dan kepala desa ikut menjaga karena pajak ini milik kita bersama,” ujarnya. Hartopo juga meminta semua pihak agar mendorong partisipasi masyarakat dalam membayar pajak demi kelancaran pembangunan daerah. “Saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan meminta agar hal ini dipertahankan dan dikembangkan ke bidang yang lain,” ujarnya. Pun dirinya juga mengucapkam selamat kepada para pemenang.

“Kegiatan ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami dan ikhiar kita bersama untuk meletakkan pondasi di masa depan melalui Kudus yang modern, religius, cerdas dan sejahtera,” ujarnya. Dinamika perubahan yang sangat cepat seperti sekarang, ujarnya, membuat inovasi menjadi harga mati yang tak bisa ditawar lagi. “Oleh karena itu, kita butuh superteam yang inovatif bukan superman yang hanya one man show,” ujarnya. Membenahi daerah membutuhkan kerjasama banyak pihak bukan sekedar aksi kepala daerah seorang diri atau kepala UPT.

Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono menyatakan host to host mungkin istilah yang agak asing bagi khalayak umum. Namun intinya sekarang DPPKAD bisa melihat data pembayaran pajak oleh wajib pajak setiap saat. “Termasuk para wajib pajak bisa memanfaatkan beberapa fasilitas pembayaran yang dipunyai, bisa melalui ATM, transfer, atau debit,” ujarnya. Acara ini diselenggarakan untuk peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perpajakan daerah, sekaligus memberikan penghargaan kepada wajib PBB perkotaan dengan tepat waktu. Eko menjelaskan sebagai tindak lanjut MoU, akan disusun perjanjian kerjasama sebagai dasar menghubungkan database secara sistem informasi melalui aplikasi.

Sementara dirinya menyatakan pengundian hadiah PBB dibatasi yang membayar hingga akhir Bulan Agustus. “Yang membayar sampai Agustus 2018 sejumlah 154 ribu,” ujarnya. Hadiah utama berupa dua buah sepeda motor, sedangkan lainnya diundi oleh masing-masing camat. “Ada masing-masing uang satu juta rupiah, kulkas, sepeda, mesin cuci, dll, masing-masing kecamatan hadiahnya 10 item,” ujarnya.

Wakil Bupati Kudus bersama Forkopimda menekan bel tanda launching bersama Pimpinan Bank Jateng cabang Kudus, dan jajaran Forkopimda yang mewakili. Dilanjutkan dengan launching Satgas pajak yang ditandai dengan memakaikan rompi dan topi kepada Satgas pajak. Dilanjutkan dengan penandatangan MoU untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan Kudus. Hartopo ikut mengundi hadiah utama pada pengundian hadiah PBB-P2. Kedua pemenang tersebut atas nama Siti Zubaedah Desa Bulungkulon Kecamatan Jekulo, dan Supiah BT Sumakno Desa Kandangmas Kecamatan Dawe.